

SIARAN PERS

BAWASLU LAMPUNG PERKUAT KAMPANYE ANTI-POLITIK UANG DENGAN PENYEBARAN ALAT PERAGA SOSIALISASI DAN PROGRAM PARTISIPATIF

Bandar Lampung, 10 November 2024 – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung bersama dengan 15 Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Lampung meluncurkan kampanye masif untuk melawan praktik politik uang. Kampanye ini dilakukan melalui penyebaran ratusan ribu alat peraga sosialisasi (APS) yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga integritas pemilu.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menjelaskan bahwa alat peraga tersebut mencakup berbagai media, seperti tayangan di videotron, baju kaus, stiker, spanduk, baliho, banner, selebaran, dan brosur.

“Tujuan utama kami adalah mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk politik uang. Kami ingin masyarakat memahami bahwa praktik ini merusak demokrasi dan mengancam kualitas pemilu. Dengan kampanye ini, kami mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemilu yang bersih, jujur, dan berintegritas,” ujar Iskardo saat ditemui di Bandarlampung, Minggu (10/11).

Bawaslu Lampung tidak hanya mengandalkan penyebaran APS, tetapi juga memperluas jangkauan kampanye melalui program-program edukasi langsung seperti **Bawaslu Goes to School**, **Bawaslu Goes to Campus**, serta pembentukan Kampung Pengawasan Partisipatif dan Kampung Antipolitik Uang.

“Pendekatan berbasis komunitas ini bertujuan menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa, yang diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam menjaga demokrasi. Dengan keterlibatan aktif mereka, pengawasan partisipatif dapat lebih efektif,” tambah Iskardo.

Sebagai bagian dari pengawasan yang lebih intensif, Bawaslu Lampung dan jajaran di tingkat kabupaten/kota telah mendirikan Posko Aduan. Posko ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, termasuk praktik politik uang, yang terjadi selama masa kampanye, masa tenang, hingga hari pemungutan suara.

“Melalui Posko Aduan ini, masyarakat tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga berkontribusi aktif dalam menindak pelanggaran. Semua laporan yang masuk akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme hukum,” jelas Iskardo.

Provinsi Lampung saat ini berada di posisi kedua dalam Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan (IKP) 2024 secara nasional dengan skor 64,61, hanya berada di bawah Provinsi Banten. Dalam kategori kerawanan politik uang, Lampung menempati peringkat kedua dengan skor 55,56. Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Barat tercatat memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi, masing-masing dengan indeks 47,45 dan 11,86.

Iskardo menyadari tantangan besar yang dihadapi Lampung terkait kerawanan politik uang. Namun, ia optimistis bahwa berbagai inisiatif yang telah dilakukan dapat menurunkan tingkat kerawanan ini.

“Melalui kampanye antipolitik uang dan pengawasan intensif, kami berharap Lampung dapat keluar dari daftar 15 besar atau bahkan 20 besar dalam indeks kerawanan politik uang pada pemilu mendatang,” ungkapnya.

Iskardo menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan 15 Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membawa perubahan signifikan.

“Dengan kerja sama antara Bawaslu, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, kita dapat menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas. Ini bukan hanya soal memenangkan kandidat tertentu, tetapi juga tentang menjaga masa depan demokrasi kita,” pungkasnya.

Melalui kampanye dan pengawasan yang berkelanjutan, Bawaslu Lampung berharap dapat menginspirasi daerah lain untuk mengikuti langkah serupa dalam melawan politik uang demi memperkuat demokrasi di Indonesia.

**KETUA BAWASLU PROVINSI
LAMPUNG**

(ttd)

ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.



lampung.bawaslu.go.id



bawaslulampung

Narahubung Pencegahan pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2024

Nama	:	Hamid Badrul Munir, S.Hi.
Jabatan	:	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung (Kordiv Pencegahan dan Parmas)
No HP/ Wa	:	0812 7207 7011